

# Pelembagaan *Participatory Poverty Assessment* Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Samigaluh Kabupaten Kulonprogo

<http://dx.doi.org/10.18196/jgp.2011.0003>

Awang Darumurti

Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Email: [Awang.darumurti@yahoo.co.id](mailto:Awang.darumurti@yahoo.co.id)

---

## ABSTRACT

This article try to analysis strategy for reducing poverty in Samigaluh Municapy, Kulonprogo Region by using Participatory Poverty Assessment (PPA) strategy. PPA known as strategy to reduce poverty by including poor people to find solution of their poverty problem. In Other word, this strategy use bottom up method to reduce poverty. In Samigaluh, Poverty condition clearly seen as so many people live in near poor condition. This research use qualitative approach and data collect technic use interview and observation. From the research is gotten data that poor condition in Samigaluh caused by economic aspect, uncapability, isolation condition. PPA strategy, which is including poor people in solution making, give result that we must do some activities. The Activities are women empowerment, Informal institution empowerment, Increase Education, Training, and so on.

Keywords: Strategy, Reduce Poverty, Participatory Poverty Assessment

## ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang strategi pengentasan kemiskinan di Kecamatan Samigaluh Kabupaten kulonprogo dengan metode Participacy Poverty Assessment (PPA). PPA merupakan strategi pengentasan kemiskinan dengan melibatkan masyarakat miskin untuk mencari solusi atas kemiskinan yang mereka alami. Dengan kata lain metode pengentasan kemiskinan ini bersifat bottom up. Di Kecamatan Samigaluh kondisi kemiskinan tampak



- demikian pembangunan di Kecamatan Samigaluh akan tepat sasaran
2. Solusi untuk pengentasan kemiskinan yang ditawarkan oleh peneliti memberikan kontribusi bagi *stakeholder* setempat dalam membuat kebijakan pengentasan kemiskinan di Kecamatan Samigaluh.
  3. Sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah akan tercipta, hal ini disebabkan karena metode PPA menyediakan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Komunikasi yang intensif antara rakyat dan pemerintah akan memudahkan kebijakan pembangunan di Kecamatan Samigaluh.

## KERANGKA TEORITIK

### 1. Kemiskinan

Definisi tentang kemiskinan telah banyak diungkapkan dan menjadi bahan perdebatan. Bahkan pendekatan kuantitatif untuk mendefinisikan kemiskinan telah diperdebatkan secara luas oleh beberapa peneliti yang mempunyai minat dalam masalah ini (Jennings, 1994; Pandji-Indra, 2001). Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Parwoto, 2001). Kondisi tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar atau asasi manusia seperti sandang, pangan, papan, afeksi, keamanan, identitas kultural, proteksi, kreasi, kebebasan, partisipasi, dan waktu luang (Fernandez, 2000).

Tinjauan lain mengenai kemiskinan adalah garis kemiskinan (*poverty line*) dan ukuran kemiskinan (*poverty measurement*), yang merupakan indikator kuantitatif untuk menentukan individu atau kelompok masyarakat miskin. Garis kemiskinan biasanya dihubungkan dengan standar hidup, yaitu jumlah uang yang dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. *Participatory Poverty Assessment* mengidentifikasi bahwa kemiskinan juga ditekankan pada aspek-aspek lain seperti kerentanan, keterisolasian secara fisik dan sosial, kurangnya rasa aman dan harga diri, dan ketidakberdayaan (Robb, 1999; Pandji-Indra, 2001).

### 2. *Participatory Poverty Assessment* (PPA)

Melalui praktek PPA diharapkan suara rakyat miskin lebih kuat

memandu terjadinya perubahan kebijakan, terutama kebijakan yang mempengaruhi lingkungan kehidupan mereka. Dalam dokumen *A rough to PPA*, dijelaskan, sosialisasi dan perkembangan PPA mengikuti banyak dan ragam aksi promosi perubahan kebijakan yang didasarkan pada pendekatan partisipatori. PPA menyatakan pentingnya komitmen atas pentingnya pelibatan cara pandang rakyat miskin itu sendiri dalam analisis kemiskinan dan formulasi strategi penanggulangan kemiskinan (Norton, 2001). Dengan begitu pendekatan dan metode yang memperkuat partisipasi dan suara rakyat miskin dalam desain dan pelaksanaannya menjadi hal penting dalam pengembangan konsep dan praktek PPA. Prinsip-prinsip yang mampu menegaskan hak dan martabat rakyat miskin harus ditegaskan. Masalah etik juga harus diperhatikan dalam praktek PPA, terutama berkait dengan desain, pelaksanaan, pengaruh otoritas kelembagaan dan pengetahuan dalam proses pelaksanaannya (Javlec, 2006)

Pelaksanaan PPA merupakan tahapan atau langkah penting dalam proses penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah. Melalui PPA akan diidentifikasi prioritas masalah komunitas miskin. Strategi mereka melangsungkan kehidupan, dan upaya untuk lepas dari kemiskinan (Mc Gee, 2001). Atas dasar hasil PPA, kaji ulang kebijakan terhadap berbagai kebijakan yang tidak berpihak pada upaya pemenuhan hak rakyat miskin dapat dilaksanakan, dan dengan demikian formulasi strategi kebijakan yang dirumuskan akan lebih tegas dan fokus (Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2003). Apabila satu pemerintah melalui kepemimpinan di eksekutif dan legislatif telah berkomitmen untuk membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan rakyat miskin, maka untuk itulah PPA akan didayagunakan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pelembagaan *participatory poverty assessment* sebagai upaya untuk memformulasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo. Data penelitian didapat dari sumber utama yaitu masyarakat di Kecamatan Samigaluh yang diidentifikasi sebagai rakyat miskin melalui metode *FGD*, *semi structured group* dan *deep interview* untuk

memperoleh informasi siapa saja yang menderita kemiskinan, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, penyebab kemiskinan, sekaligus untuk merancang solusi pengentasan kemiskinan berbasis PPA. Pekerjaan analisis lebih pada upaya mengorganisasikan temuan, dan kemudian mengkonstruksikan temuan tersebut dalam bingkai obyek yang diteliti. Dari analisis ini kemudian akan diperoleh kesimpulan makna yang ramah dengan obyek penelitian, dan bermanfaat bagi pembuatan rekomendasi penelitian yang bisa diterapkan di lapangan. Ini juga mendukung metode PPA yang memang menempatkan rakyat/responden sebagai sumber informasi utama dengan tanpa intervensi dari peneliti. Populasi penelitian adalah rakyat miskin di seluruh Indonesia yang diwakili oleh rakyat miskin yang berada di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo. Penentuan Sampel dilakukan melalui *purposive sampling*.

## HASIL DAN ANALISIS

### 1. Gambaran Umum Kemiskinan di Kecamatan Samigaluh

Secara geografis Kecamatan Samigaluh, merupakan salah satu kecamatan paling utara di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Girimulyo dan Kalibawang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kalibawang, sebelah utara adalah Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebelah barat adalah Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Letak Kecamatan Samigaluh sangat strategis, karena berada di persimpangan lalu lintas perdagangan antara DIY dan Jawa Tengah. Di samping itu nantinya diharapkan mampu sebagai pusat perekonomian di wilayah Kulonprogo bagian utara untuk mengimbangi bagian selatan Kulonprogo yang segera akan dibangun Pangkalan Angkatan Laut, dan Bandar Udara menggantikan Adi Sucipto.

Kecamatan Samigaluh sendiri mempunyai 7 Desa yakni Desa Kebonharjo, Banjarsari, Purwoharjo, Sidoharjo, Gerbosari, Ngargosari, Pagerharjo. Sampel penelitian di tiga desa. Ketiga desa tersebut adalah desa Purwoharjo, Desa Sidoharjo dan Desa Gerbosari. Eksplorasi dari ketiga desa ini bisa menjadi sampel bagi pengentasan kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Samigaluh. Data penggolongan status keluarga tertera dalam tabel berikut.

TABEL 1. DATA KELUARGA PRA SEJAHTERA, KS I, KS II, KS III, KS+

No	Nama Desa	Pra KS	KS I	KS II	KS III	KS+	Total
1	Desa Kebonharjo	487	98	415	67	-	637
2	Desa Banjarsari	631	185	105	50	-	833
3	Desa Purwoharjo	815	186	26	51	13	1054
4	Desa Sidoharjo	1042	266	78	62	23	1146
5	Desa Gerbosari	587	185	68	439	84	1145
6	Desa Ngargosari	663	142	88	252	16	938
7	Desa Pagerharjo	832	170	46	343	22	1312

Sumber: BPS Kabupaten Kulonprogo, 2010

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Samigaluh memang masih banyak yang menghadapi masalah kemiskinan yang serius. Faktor penyebab dan aspek-aspek yang menimbulkan kemiskinan begitu kompleks dan tidak hanya berasal dari satu atau dua aspek saja. Jika dianalisa dari aspek penyebab kemiskinan, apakah aspek internal atau eksternal, maka dari hasil penelitian didapatkan data bahwa dua aspek, yakni internal dan eksternal memberi kontribusi terjadinya kemiskinan di Kecamatan Samigaluh. Penjelasan secara lebih mendalam dapat dilihat pada analisa berikut ini

Tema yang pertama, yakni tentang pemahaman masyarakat mengenai kemiskinan dapat dianalisis bahwa kondisi masyarakat pada umumnya masih miskin, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya lapangan pekerjaan selain bertani, buruh dan tukang kayu. Keadaan daerah yang terisolasi ini juga didukung dengan tidak adanya akses informasi yang cukup. Akses informasi biasanya didapat hanya dari menonton Televisi karena memang hampir setiap rumah memiliki Televisi dan motor, akan tetapi untuk informasi berkaitan dengan wilayah Yogyakarta sendiri ini tidak ada.

Tema kedua tentang sebab mereka bisa miskin didapatkan analisa bahwa keadaan para pemudanya yang kurang ulet membangun desa mereka sendiri dapat menyebabkan munculnya kemiskinan kultural. Dimana kondisi seperti ini akan terus berlangsung sampai pada generasi berikutnya. Kondisi perumahan masyarakat juga tidak bisa dianggap layak berdasarkan standar rumah layak huni. Hal ini dikarenakan pada umumnya rumah-rumah di tiga desa (Gerbosari, Sidoharjo dan Purwoharjo) sudah terbuat dari tembok, akan tetapi lantainya masih terbuat dari tanah, juga tidak adanya ventilasi yang bagus sebagai tempat keluar masuknya udara.

Tema ketiga didapatkan hasil bahwa tingkat pendidikan rata-rata yang diperoleh masyarakat hanya sampai pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir, itupun paling banyak terdapat di desa Gerbosari, karena secara geografis letak desa Gerbosari paling dekat dengan kecamatan dan dapat dianggap lebih maju dalam berbagai bidang dari desa-desa lainnya. Sedangkan untuk desa Sidoharjo dan Purwoharjo tingkat pendidikan rata-ratanya hanya sampai pada tingkatan Sekolah Menengah Pertama.

Tema keempat adalah kemiskinan di desa, didapatkan data bahwa isu-isu yang terkait dengan kemiskinan semuanya masuk menjadi faktor yang menyebabkan kemiskinan di Kecamatan Samigaluh. Dari isu mengenai informasi misalnya, diketahui dari interview dan observasi langsung ke desa-desa di Samigaluh bahwa informasi mengenai berbagai hal yang terkait dengan kemiskinan. Akses informasi sangat sulit didapatkan oleh warga di Kecamatan Samigaluh.

Aspek potensi sumber daya alam, ada beberapa komoditas yang bisa dikembangkan oleh penduduk setempat, terutama cengkeh dan vanilla serta beberapa hasil hutan serta pertanian. Satu kelemahan yang terjadi di Samigaluh adalah diversifikasi pangan dan peningkatan nilai jual sumberdaya alam belum dikembangkan secara maksimal. Kondisi infrastruktur kesehatan di Kecamatan Samigaluh relatif masih minim. Satu lagi persoalan yang dihadapi oleh penduduk setempat adalah persoalan untuk mendapatkan asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin.

Masuk pada analisa tema keenam tentang kondisi infrastruktur, layanan sosial dan tingkat keterisolasian desa, maka dari hasil penelitian didapatkan data bahwa untuk infrastruktur jalan kondisi jalan desa di Kecamatan Samigaluh masih banyak yang memprihatinkan. Jalan masih berbatu dan belum diaspal dengan lebar jalan yang sangat sempit hanya cukup untuk sepeda motor, sehingga mobil tidak akan leluasa untuk bisa masuk ke semua area di desa-desa di Kecamatan Samigaluh. Dari analisa hasil penelitian itu, didapatkan sebuah analisa baru mengenai aspek yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di Kecamatan Samigaluh. Berdasarkan metode PPA didapatkan data bahwa aspek ekonomi, aspek kerentanan, aspek keterisolasian, aspek ketidakberdayaan adalah aspek-aspek yang memberikan kontribusi terjadinya kemiskinan di Kecamatan Samigaluh.

## 2. Strategi Pengentasan Kemiskinan di Samigaluh

Dari data identifikasi kemiskinan menggunakan metode PPA didapatkan informasi bahwa aspek penyebab kemiskinan di Kecamatan Samigaluh dikarenakan empat hal, yakni aspek ekonomi, aspek kerentanan, aspek keterisolasian, dan aspek ketidakberdayaan. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan difokuskan pada penanganan kemiskinan berdasarkan empat aspek tersebut sesuai dengan persoalan yang dihadapi oleh penduduk di Kecamatan itu.

### a. Strategi Pengentasan Kemiskinan Karena Aspek Ekonomi

Sebenarnya banyak sekali contoh program pengentasan kemiskinan yang dinilai berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin jika dilihat dari aspek ekonomi. Salah satu contoh sukses pengentasan kemiskinan yang diakui oleh dunia adalah keberhasilan China dalam menurunkan jumlah penduduk miskin secara signifikan di tahun 2010 ini. Seperti apa program pemberantasan kemiskinan China? Tidak ada yang terlalu istimewa karena program seperti itu juga terdapat di sejumlah negara. Misalnya, China mencanangkan pemberdayaan wanita, perbaikan sarana pedesaan, pengadaan air bersih, dan pembangunan infrastruktur hingga ke pedesaan. Itu semua ditemukan di banyak negara, termasuk Indonesia (*Kompas*, 21 September 2010).

Pengentasan kemiskinan dalam konteks nasional tersebut dapat diadopsi ke level yang lebih bawah termasuk pengentasan kemiskinan di Kecamatan Samigaluh Kulon Progo. Program pengentasan kemiskinan di China yang dapat diadopsi di Kecamatan Samigaluh terkait dengan aspek ekonomi adalah masalah pemberdayaan wanita. Nampak jelas dari data identifikasi kemiskinan di Samigaluh, didapatkan informasi bahwa tidak ada pemberdayaan wanita yang optimal di Kecamatan bagian utara di Kulonprogo itu. Padahal pemberdayaan perempuan merupakan salah satu strategi yang cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk yang miskin.

Fenomena yang terjadi di Samigaluh menunjukkan bahwa perempuan hanya menjadi penunggu rumah yang hanya mengurus anak dan menunggu rumah. Padahal jika perempuan di Samigaluh dapat diberdayakan, maka potensi ekonomi yang didapatkan akan lebih besar. Banyak sekali sumber daya alam yang bisa dikomoditaskan di Kecamatan

Samigaluh ini. Komoditas ketela merupakan salah satu potensi yang bisa dikembangkan dan dikerjakan oleh perempuan untuk dijadikan komoditas ekonomi layak jual. Berbagai sumber makanan dapat diolah dari bahan utama ketela, tentu dengan modifikasi tertentu sehingga dapat meningkatkan nilai jualnya.

Untuk itulah perempuan disana perlu mendapatkan pelatihan tentang bagaimana mengolah ketela menjadi bahan makanan yang bernilai jual tinggi. *Stakeholder* yang bisa berperan dalam hal ini adalah beberapa dinas yang terkait dengan masalah pemberdayaan ekonomi. Metode yang dipakai bisa memanfaatkan momentum berkumpulnya para perempuan jika mereka sedang mengadakan kegiatan rutin, diantaranya pelaksanaan kegiatan PKK. Perempuan di Samigaluh bisa dibagi menjadi beberapa kelompok kerja untuk mengolah bahan ketela yang banyak ditemukan disana untuk kemudian diolah menjadi makanan siap saji. Jika pemberdayaan perempuan dapat dilakukan di Samigaluh, maka potensi sumber daya alam disana dapat dioptimalkan untuk dijadikan komoditas ekonomi.

Selain melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat di Samigaluh, terutama perempuan, untuk mengangkat perekonomian di Samigaluh, maka pemerintah harus melakukan pembangunan ekonomi secara merata di Kulonprogo, utamanya di Kecamatan ini. Keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembangunan salah satu indikatornya adalah semakin turunnya tingkat kemiskinan. Dengan demikian Pemerintah wajib melakukan pemberantasan kemiskinan untuk menunjukkan keseriusan mereka dalam pembangunan. Selain itu program pengentasan kemiskinan juga tak mungkin berjalan tanpa adanya tata-kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagai dasar bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan di manapun, termasuk dan terutama di Indonesia, yang diantaranya ditandai oleh berjalannya: Sistem pemerintahan yang demokratis, transparan dan bertanggung gugat kepada publik; Kebijakan ekonomi, sosial dan lingkungan yang dirancang dan dilaksanakan secara terpadu dan partisipatif; Lembaga-lembaga demokratis yang tanggap (*responsif*) terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat; Peraturan hukum dan perundang-undangan yang ditaati dan dilaksanakan secara konsisten dan adil; Upaya pemberantasan korupsi yang dilaksanakan secara tegas

tanpa pandang bulu; Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta hak-hak dan kepentingan masyarakat adat dan kelompok masyarakat rentan.

Upaya serius pemerintah (terutama Pemkab Kulonprogo) sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya pembangunan ekonomi di Samigaluh. Jika Pemkab Kulon Progo serius mengurangi jumlah kemiskinan di Kecamatan Samigaluh, maka paling tidak dari aspek ekonomi yang merupakan salah satu penyebab kemiskinan disana dapat dikurangi. Pendapatan masyarakat akan lebih terjamin jika pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprogo.

*b. Strategi Pengentasan Kemiskinan Karena Aspek Kerentanan*

Aspek kerentanan dapat dipahami menjadi aspek pendukung bagi kemiskinan di Samigaluh mengingat secara umum masyarakat di sana tidak mempunyai kapasitas yang mencukupi untuk bisa bertahan dari guncangan ekonomi ataupun berbagai kegagalan panen akibat bencana alam. Dengan pendidikan yang relatif rendah, bisa dipastikan bahwa masyarakat di kecamatan itu cenderung untuk melakukan kegiatan yang pola-polanya itu saja, tanpa memperhatikan dan memprediksi kondisi alam. Dengan kondisi inilah, maka banyak sekali kegagalan panen sumberdaya alam disana yang berakibat pada kurangnya sumber pendapatan.

Untuk bisa mengatasi persoalan kerentanan ini, solusi yang diberikan harus melibatkan banyak sekali pihak terkait, baik dari level atas (negara) dan masyarakat itu sendiri. Salah satu solusi yang diberikan untuk mengatasi masalah kerentanan adalah peningkatan kapasitas penduduk Samigaluh dengan ketrampilan yang tidak tergantung dengan alam hasil-hasilnya, atau bisa juga dengan peningkatan pendidikan masyarakat setempat dengan harapan bahwa generasi yang akan datang di Samigaluh tidak akan mempunyai tingkat pendidikan yang rendah.

Negara atau Pemerintah Kabupaten Kulonprogo perlu memiliki sistem pengembangan keterampilan yang sejak usia dini memerhatikan nutrisi, stimulasi, dan keterampilan kognitif dasar. Sistem yang memastikan semua sekolah memiliki standar jelas, guru berkualitas, sumber daya memadai,

dan berorientasi pada prestasi. Sistem yang membentuk keterampilan sesuai kebutuhan modern dengan menekankan pendidikan tinggi dan pelatihan di tempat kerja. Sistem yang mendorong kewirausahaan dan inovasi (*Kompas*, 2 September 2010). Dengan demikian warga di Samigaluh bisa bertahan jika terjadi guncangan ekonomi ataupun kegagalan panen akibat bencana alam.

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo juga perlu memperbaiki iklim investasi dengan membentuk peraturan yang lebih jelas, mempermudah jalannya usaha, serta menyediakan pendanaan untuk UKM, baik untuk investasi swasta maupun untuk masyarakat miskin. Pemkab Kulonprogo juga perlu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bebas korupsi. Bersama mitra-mitra pembangunannya, pemerintah perlu bergerak cepat menciptakan kesempatan lebih luas, termasuk bagi anak gadis dan perempuan, karena perekonomian tidak akan maju berhasil apabila mereka didiskriminasikan. Jika ini bisa diwujudkan, maka ketrampilan usaha yang telah dimiliki oleh warga Samigaluh dapat bertahan terus karena telah mendapat jaminan dari pemerintah.

Kondisi seperti inilah yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprogo ataupun pemerintah Kecamatan Samigaluh untuk bisa membuat program yang tidak mengurangi luasan sumber daya yang dimiliki oleh penduduk setempat. Jika dilihat dalam tabel, maka inti permasalahan kemiskinan di Samigaluh dari aspek kerentanan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 2. PETA MASALAH DI SAMIGALUH

No	Masalah	Pemecahan yang sudah dilakukan	Rencana ke depan
1	Kesulitan Pendapatan	Meminjam uang ke tetangga atau majikan	Hasil ternak dan pertanian di optimalkan
2	Lapangan pekerjaan lain	Kerja serabutan	Menciptakan lapangan kerja sendiri
3	Modal usaha tidak punya	Pinjaman modal, tetapi akses masih sangat sulit	Mencari modal usaha dengan bunga lunak
4	Bakat/ketrampilan terbatas	Jadi pekerja serabutan	Berusaha mendapatkan pekerjaan tetap

Sumber: Data Primer, 2010

Persoalan itulah yang sering dihadapi oleh penduduk di Samigaluh akibat dari aspek kerentanan. Berbagai solusi yang telah ditampilkan diatas, perlu untuk segera dilakukan oleh warga setempat dengan bantuan dari pemerintah desa dan kecamatan.

c. *Strategi Pengentasan Kemiskinan Karena Aspek Keterisolasian*

Dari aspek keterisolasian dapat dianalisis bahwa penduduk setempat mengalami keterisolasian fisik dan psikologis. Keterisolasian fisik terutama karena infrastruktur di sana masih sangat minim. Ini juga yang menjadi persoalan bagi pemerintah seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pembangunan infrastruktur, terutama jalan, merupakan persoalan yang dihadapi oleh penduduk di Kecamatan Samigaluh. Distribusi sumberdaya ekonomi menjadi tidak lancar jika infrastruktur jalan tidak baik. Demikian juga dengan relasi sosial yang kurang erat, jika untuk bertemu harus melalui jalan yang sangat buruk.

Untuk itulah komitmen penting dari pemerintah, terutama Pemkab Kulonprogo dan Pemerintah Kecamatan Samigaluh menjadi sangat penting. Komitmen keuangan adalah kata kunci yang harus diupayakan oleh *stakeholder* setempat jika ingin mengurangi persoalan akibat aspek keterisolasian fisik ini. APBD Kabupaten Kulonprogo harus mulai dirancang dengan prioritas penanganan infrastruktur bagi daerah tertinggal, terutama di Samigaluh yang merupakan kecamatan dengan tingkat kemiskinan paling tinggi di Kulonprogo. Porsi APBD yang tidak terlalu signifikan, misalnya untuk fasilitas pejabat ataupun belanja barang sekunder bagi pemerintah dapat dikurangi alokasi anggarannya dan dialihkan kepada penanganan masalah keterisolasian di Kecamatan Samigaluh.

Pendidikan merupakan elemen utama agar masyarakat disana bisa terlibat dalam penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan. Sangat mungkin kondisi tidak dilibatkannya warga dalam pengambilan solusi kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai kemampuan yang baik untuk mencari sebuah solusi yang diakibatkan karena kemampuan warga yang kurang. Kemampuan yang kurang ini sangat mungkin adalah bukti tidak baiknya pendidikan yang diterima oleh warga di sana. Dengan demikian program pendidikan untuk semua mutlak untuk segera dilakukan.

Program yang disusun untuk mengatasi persoalan keterisolasian fisik dan psikologis ini pada akhirnya akan mengurangi persoalan kemiskinan di Kecamatan Samigaluh. Dengan adanya pembangunan jalan dan infrastruktur di Samigaluh, maka kegiatan perekonomian akan berjalan

dengan lebih mudah dan lancar. Demikian juga dengan peningkatan pendidikan yang akan berakibat pada lebih besarnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan bagi penduduk setempat. Jika hal itu bisa dilakukan maka persoalan kemiskinan dari aspek keterisolasian ini bisa diatasi.

*d. Strategi Pengentasan Kemiskinan Karena Aspek Ketidakberdayaan*

Kebijakan pemerintah yang pro kapitalis membuat rakyat di level bawah menjadi tidak berdaya, karena setiap kebijakan yang dibuat selalu untuk dipaksakan dalam implementasinya tanpa banyak menganalisa apakah sudah tepat sasaran untuk masyarakat di daerah tersebut. Disisi yang lain, masyarakat cenderung untuk tidak dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan nasib mereka. Ini juga yang terjadi di Samigaluh, dengan adanya fakta bahwa masyarakat disana tidak banyak dilibatkan dalam setiap kali pembuatan keputusan di tingkat kelurahan ataupun kecamatan.

Ketidakberdayaan seperti inilah yang membuat rakyat tidak bisa menyuarkan aspirasi mereka terkait dengan kondisi kemiskinan yang mereka hadapi. Suara rakyat miskin menjadi tidak berarti jika setiap kebijakan yang dibuat tidak melibatkan mereka dalam mencari solusi, padahal yang tahu dengan baik persoalan yang dihadapi tentu saja adalah penduduk miskin yang memang mengalami kondisi yang menyakitkan itu. Karena seringkali tidak melibatkan rakyat miskin dalam setiap pengambilan keputusan, maka seringkali kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah menjadi gagal.

Faktor lain berkaitan dengan kelemahan organisasi pelaksana seperti pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan atau desa. Oleh karena itu, diperlukan strategi baru untuk mengentaskan kemiskinan yang menggunakan potensi sosial lokal untuk membantu orang miskin terbebas dari kemiskinannya. Strategi yang dikembangkan termasuk dalam *community based development* dengan menggunakan potensi lokal setempat. Dengan strategi ini, aspek ketidakberdayaan menjadi hilang karena praktis rakyat (miskin) dilibatkan dalam setiap langkah penyelesaian persoalan kemiskinan. Model strategi pengentasan kemiskinan berbasis institusi lokal yang akan diujicobakan pada tingkat kelurahan meliputi hal-hal seperti

berikut ini: *Pertama*, dari aspek konsep bahwa pengentasan kemiskinan berbasis institusi lokal diartikan program yang bertumpu kepada kekuatan komunitas lokal tempatan dengan mengandalkan organisasi sosial yang telah ada. Tujuannya agar komunitas lokal dan tokoh masyarakat pelaku aktif pengentasan kemiskinan. Orang miskin sebagai pelaku utama dan pihak lain sebagai mitra. Partisipasi diperlukan mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pemeliharaan. *Kedua*, dari aspek prinsip bahwa organisasi sosial dan tokoh masyarakat harus aktif dan proaktif dalam pengentasan kemiskinan yang disusun sesuai potensi dan aspirasi masyarakat. Diperlukan badan atau organisasi sosial yang bertugas mengkoordinasikan upaya pengentasan kemiskinan. Diperlukan pendampingan yang menguasai tentang strategi dan teknik penanggulangan kemiskinan. Program bersifat pemberdayaan komunitas. *Ketiga*, dari aspek sasaran bahwa komunitas kelurahan dengan angka kemiskinan tinggi melalui lembaga-lembaga dan rumah tangga miskin. Meningkatkan peran kelurahan yang mempunyai program anti kemiskinan berdasarkan potensi dan aspirasi lokal. Di lokasi dibentuk organisasi dengan sebutan Panitia Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan.<sup>1</sup>

## KESIMPULAN

Secara umum untuk mengatasi kemiskinan di Samigaluh yang terjadi karena aspek ekonomi, kerentanan, keterisolasian dan ketidakberdayaan dapat dilakukan dengan berbagai solusi seperti yang telah dibahas pada bab strategi pengentasan kemiskinan. Namun ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kulonprogo dan juga pemerintah Kecamatan Samigaluh untuk segera melakukan berbagai upaya terkait dengan strategi penanggulangan kemiskinan di sana. Berbagai langkah tersebut diantaranya adalah perluasan kesempatan, pemberdayaan, peningkatan kapasitas, perlindungan sosial, penataan kemitraan. Sekali lagi komitmen Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dan Kecamatan Samigaluh merupakan kata kunci penting untuk memulai semua program yang telah ditawarkan agar kondisi kemiskinan dapat diatasi.

**(FOOTNOTES)**

- <sup>1</sup> Diadaptasi dari makalah (anonim) program pengentasan kemiskinan di Sumatra Barat berbasis penguatan institusi lokal di tingkat kelurahan

**DAFTAR PUSTAKA**

- Djohar, I. 1999. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan Masyarakat Kotamadya Batam dengan Pendekatan Model Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE)*, Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Firman, Ahmad, dan Linda Herlinda. 2008. *Analisa Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan Pada Peternak Sapi Perah*. Fakultas peternakan Universitas Padjajaran, Bandung
- Haeruman, Herman J.S. 1997. *Strategi, Kebijakan dan Program Pembangunan Masyarakat Desa: kearah integrasi perekonomian kota-desa*, Seminar Nasional Pengembangan Perekonomian Perdesaan Indonesia, Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Javlec. 2006. "Suara si Miskin". *Modul pelatihan PPA*, Yogyakarta
- Panji, Indra. 1997. *An Analysis Towards Urban Poverty Alleviation Program in Indonesia*, Philosophy Doctor Dissertation. Faculty of the School Policy, Planning, and Development. University of Southern California, California.
- Parwoto.2001. *Makalah Penanggulangan Kemiskinan (Unpublished)*, Departemen Permukiman dan Pembangunan Sarana Wilayah, Jakarta
- Pattiro.2008. *Penanggulangan kemiskinan daerah*, makalah, Magelang
- Rusli, S., H. Siregar, dan Y. Saukat.1996. *Pembangunan dan Fenomena Kemiskinan Kasus Profil Propinsi Riau*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Suparlan, Parsudi.2000. *Kemiskinan Perkotaan dan Alternatif Penanganannya*, Ditujukkan dalam Seminar Forum Perkotaan, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta
- Sumodiningrat, Gunawan.1998. *JPS dan Pemberdayaan*, Gramedia, Jakarta